

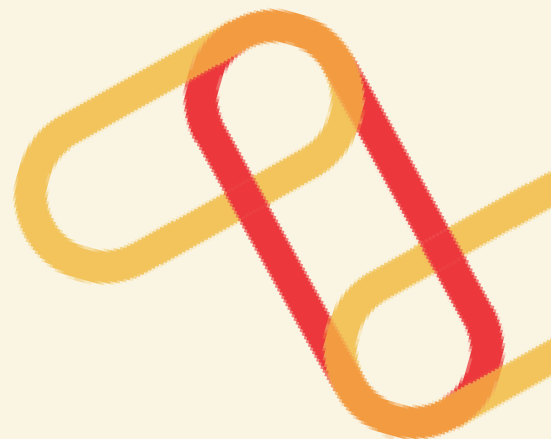


Foto: Dok. INFID, Dayakologi, YKPM

NGOBROL BARENG

"HAM dan Lensa Orang Muda": Peluncuran Mini Survei "Generasi Emas 'Dibuat' Cemas"



Keterangan: Ngobrol Bareng
"HAM dan Lensa Orang Muda":
Peluncuran Mini Survei
"Generasi Emas 'Dibuat' Cemas"
Foto: Dok. INFID/Fikriyah Nurshafa

Sebagai bagian dari seri diskusi "Ngobrol Bareng #KitaPahamBareng", INFID menggelar diskusi bertajuk "HAM dan Lensa Orang Muda" pada 24 April 2026 lalu. Kegiatan ini didasarkan atas mini survey yang diadakan November-Desember 2025 tentang "Generasi Emas 'Dibuat' Cemas, dengan responden adalah orang Muda. Dalam pemaparan hasil survey, Syafira Khairani (Network and Advocacy Lead INFID) memotret sejumlah pola yang konsisten terkait krisis kepercayaan terhadap pemenuhan dan penegakan HAM oleh negara; rasa tidak aman dalam berekspresi (74% responden merasa tidak aman menyampaikan pendapat, dengan kecenderungan melakukan self-censorship); kecemasan terhadap masa depan ekonomi dan sosial, khususnya soal pendidikan dan pekerjaan layak; ketimpangan akses layanan dasar; serta penolakan terhadap jargon politik seperti "generasi emas" dan "agent of change" yang dinilai sebagian besar responden sebagai retorika belaka.

Diskusi diperkaya dengan beberapa panelis orang muda yang bergerak di organisasi masyarakat sipil (Tuani Sondang, LBH APIK Jakarta), perwakilan mahasiswa (Akbar Syah, Pers Mahasiswa UPN Veteran Jakarta), pemerintahan (Khelmy Kalam Pribadi, Tenaga Ahli Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI), serta dimoderatori Nisa Zonzoo (Indonesia Corruption Watch). Para penanggap menilai temuan survei relevan dengan realitas sehari-hari, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang belum berpihak pada korban, menyempitnya ruang aman untuk berekspresi hingga kerentanan yang dialami perempuan dan kelompok rentan. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah mengemukakan usulan agar INFID dan jaringannya memastikan keterlibatan orang muda dalam proses konsultasi revisi Undang-Undang HAM yang tengah difinalisasi pemerintah. Laporan mini survey dapat diakses secara penuh melalui tautan <https://s.id/SurveyOrangMuda>



Dialog Publik: Peluncuran Open Budget Survey (OBS) 2025

Keterangan: Kegiatan Dialog Publik.
Foto: Dok. INFID/Fikriyah Nurshafa



INFID bersama International Budget Partnership (IBP) menyelenggarakan Dialog Publik peluncuran Open Budget Survey (OBS) 2025 dengan tema "Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Reformasi Sektor dan Tata Kelola Anggaran pada Proses Akses Indonesia ke OECD". Dialog ini diselenggarakan secara hybrid pada 7 Mei 2026. Forum ini menghadirkan Andrew Blazey (Deputy Head of the OECD Public Management and Budgeting Division, Paris) sebagai keynote speaker, serta narasumber dari IBP Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan moderasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Dalam sambutannya Siti Khoirun Ni'mah selaku Direktur Eksekutif INFID menegaskan OBS bukan sekadar instrumen pemeringkatan, melainkan instrumen pembelajaran untuk memperkuat tiga aspek: transparansi, partisipasi, dan pengawasan, sekaligus mendorong pelembagaan ruang konsultasi formal dengan masyarakat sipil agar tidak bergantung pada inisiatif ad hoc.



Keterangan: Deputy Head OECD, Andrew Blazey.
Foto: Dok. INFID/Fikriyah Nurshafa

Pada saat sesi pemaparan oleh INFID, Bona Tua P.P. menawarkan kerangka Demokrasi Fiskal untuk menyambungkan agenda OBS, partisipasi publik, dan akses OECD dengan tiga pesan kunci: OBS 2025 adalah cermin perjalanan dan bukan laporan akhir; akses OECD sebaiknya diposisikan sebagai akselerator reformasi bukan beban; dan pelibatan masyarakat sipil turut menentukan kualitas reformasi, sebagaimana terlihat pada pengalaman Kolombia dan Kosta Rika. Forum dialog publik ini dihadiri secara langsung oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil.



INFID dalam Laporan Global Forus: Cooperation That Works: Civil Society in South-South and Triangular Cooperation



Keterangan: Foto Cover Artikel
Forus "Cooperation That Works
Civil Society in South-South and
Triangular Cooperation".
Foto: Forus

Sebagai anggota jaringan global Forus, INFID turut menjadi bagian dari peluncuran laporan terbaru *Cooperation that Works: Civil Society in South-South and Triangular Cooperation* melalui side event HLPF 2026 di New York pada 9 Juli 2026. Laporan ini berangkat dari satu premis: menjelang tahun-tahun akhir Agenda 2030. South-South and Triangular Cooperation (SSTC) dilihat sebagai alternatif sekaligus pelengkap kerja sama pembangunan. Berbasis pada bukti dari seluruh jaringan Forus di lima benua, laporan ini menelaah empat pertanyaan mengenai; apa yang membuat SSTC efektif, apa kontribusi masyarakat sipil, di mana eksklusi masih terjadi, dan perubahan apa yang dibutuhkan dalam kebijakan, pendanaan, dan tata kelola serta menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah, PBB, lembaga Donor, dan jaringan masyarakat sipil sendiri agar SSTC menjadi lebih inklusif, akuntabel, dan berakar lokal menuju 2030.

Dalam laporan tersebut INFID menjadi salah satu rujukan studi kasus. Peran INFID sebagai Chair Civil 20 (C20) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi contoh nyata inklusi struktural masyarakat sipil dalam proses global yang dipimpin negara Selatan. Peranan INFID menegaskan masyarakat sipil bukan sebagai pengamat pasif atau sekadar peserta side event, melainkan aktor yang diakui secara formal, mengkoordinasi posisi kebijakan lintas negara, dan menyampaikan rekomendasi ke forum ekonomi paling berpengaruh di dunia. Laporan Global Forus secara lengkap dapat diakses melalui tautan <https://s.id/ForusHLPF>



Podcast Ngobrol Bareng #KitaPahamBareng **“Dari Pasar Ke Ruang Kebijakan: Suara Buruh Gendong yang Diabaikan Negara”**



Keterangan: Diskusi Podcast terkait topik “Dari Pasar Ke Ruang Kebijakan Suara Buruh Gendong Yang Diabaikan Negara”.
Foto: Dok. INFID/Fikriyah Nurshafa

Berangkat dari kerentanan perempuan buruh gendong di Yogyakarta dalam memperoleh upah layak dan jaminan sosial, YASANTI (Yayasan Annisa Swasti), sebuah organisasi yang berfokus pada penguatan ekonomi perempuan melakukan pendampingan. Kerja-kerja yang dilakukan yakni membentuk paguyuban dan mendampingi perempuan buruh gendong dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pengorganisasian perempuan buruh gendong oleh YASANTI bernama Sayuk Rukun yang berfokus untuk mengadvokasi hak upah layak dan jaminan kerja.

Melalui Podcast #KitaPahamBareng “Dari Pasar Ke Ruang Kebijakan: Suara Buruh Gendong yang Diabaikan Negara” dengan mengundang YASANTI (Nadlrotussariroh) dan perwakilan Sayuk Rukun (Ibu Suratmi), diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kerentanan perempuan pekerja informal, termasuk buruh gendong. Selain itu, podcast ini diharapkan dapat mendorong dukungan publik terhadap kebijakan perlindungan dan pengakuan hak pekerja informal perempuan. Artikel lengkap mengenai Podcast ini dapat dibaca dan didengarkan melalui tautan <https://s.id/PodcastINFID>



Analisis Ringkas INFID #7: "Perang, Ketimpangan, dan Rapuhnya Demokrasi: Ancaman Krisis Global bagi Indonesia"

Di tengah perang yang berkecamuk dari Ukraina hingga Timur Tengah, INFID menerbitkan Analisis Ringkas #7 yang menelusuri satu benang merah yang kerap luput mengenai ketimpangan ekonomi yang ekstrim menjadi pemicu konflik, kebangkitan populisme otoriter, sekaligus ancaman bagi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kajian ini memperlihatkan bahwa krisis global yang terjadi bertemu dengan rapuhnya ekonomi domestik seperti melemahnya rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, gelombang PHK yang meluas, serta kerentanan pekerja informal.

Dalam kajian ini, INFID menawarkan empat prasyarat bagi Indonesia yang maju dan berkeadilan, dimulai dari industri nasional yang demokratis dan berkelanjutan, jaminan kerja layak, investasi pada pembangunan manusia, hingga peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dan keadilan global.

Analisis lengkap mengenai #CloseTheGap ini dapat diakses melalui tautan <https://s.id/CTGINFID>

Keterangan: Foto artikel 'Close The Gap' ke-7 infid.
Foto: Desain INFID/Fikriyah Nurshafa





KABAR ANGGOTA

YKPM Dorong Penguatan Sistem Pengaduan Berbasis Komunitas untuk Perlindungan Perempuan

Dalam mendukung upaya akselerasi pencapaian kesetaraan gender sesuai dengan tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs). Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) dengan dukungan dari Kedutaan Swiss dan Belanda, melakukan implementasi program Strengthening Community based Complaint Systems For Women protection. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat peran komunitas dalam menerima, merespon, dan mengelola pengaduan kekerasan perempuan dan anak, khususnya pencegahan perkawinan anak di akar rumput. Pemerintah yang belum maksimal dalam menangani kasus perkawinan anak dan kekerasan menjadi latar belakang program ini diimplementasikan di dua desa yaitu, Desa Lampoko kecamatan Campalagian dan Desa Batulaya kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.



Keterangan: Proses diskusi dan penghargaan acara YKPM.
Foto: YKPM.

Rangkaian program ini dimulai dengan pelatihan untuk kader desa dalam manajemen penanganan kasus kekerasan seksual dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengenai penyusunan SOP Penanganan Kekerasan agar pengelola pos pengaduan atau kader memiliki pedoman dan dasar aturan yang jelas dan baku saat memberikan layanan serta menangani aduan kasus dari masyarakat. Rangkaian puncak dari program ini adalah kampanye dan sosialisasi publik terkait Peraturan Desa (Perdes) Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan pada 23 Juni 2026 di dua desa. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat di desa mendukung pembentukan dan optimalisasi "Pos Pengaduan Perempuan". Pos ini juga merupakan ruang aman bagi perempuan.





KABAR ANGGOTA

Gita Pertiwi Dorong Tata Kelola Pangan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan



Keterangan: Pemaparan Materi oleh Direktur Gita Pertiwi Titik Sasanti
Foto: Gita Pertiwi

Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, Yayasan Gita Pertiwi berpartisipasi dalam Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota pada 29 Juni 2026. Forum tersebut bertema “Merajut Ketangguhan Kota Melalui Tata Kelola Pangan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam sesinya Yayasan Gita Pertiwi memaparkan pengalamannya dalam pengelolaan pangan holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu Yayasan Gita Pertiwi juga menjelaskan tentang pentingnya pola rantai suplai pangan yang sehat untuk kantin sekolah. Menurut Yayasan Gita Pertiwi dalam penyaluran makan bergizi gratis diperlukan aggregator yang menghubungkan antara petani regeneratif dengan pemilik dapur SPPG, agar kepastian penyerapan produknya transparan dan siswa penerima manfaat mendapatkan produk olahan berkualitas. Keterlibatan Yayasan Gita Pertiwi dalam forum ini mempertegas komitmen Yayasan Gita Pertiwi dalam mendorong sistem pangan kota melalui penguatan jejaring antara sekolah, petani, dan pemangku kebijakan.



KABAR ANGGOTA

Dayakologi Perluas Jangkauan Sekolah Pemberdayaan Masyarakat Adat

Dayakologi (PD)/Institut Dayakologi terus mengembangkan Sekolah Pemberdayaan Masyarakat Adat ala Dayakologi (SPMAD) sebagai program pendidikan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat. Program yang dimulai pada 2020 ini telah dilaksanakan di berbagai komunitas adat di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Sekadau, dan Sintang, Kalimantan Barat.



Keterangan: Proses diskusi Dayakologi.
Foto: Dayakologi.

SPMAD merupakan adaptasi dari model Indigenous Peoples' Sustainable, Self-Determined Development (IPSSDD) yang dikembangkan ELATIA Indigenous Peoples' Training Institute, kemudian dikembangkan oleh Pusat Dayakologi menjadi kurikulum yang mencakup sepuluh materi, antara lain hak masyarakat adat, wilayah adat, perempuan adat, kebudayaan, ekonomi berkelanjutan, pengorganisasian komunitas, hingga pendokumentasian adat dan budaya.

Selain membangun pengetahuan, SPMAD juga mendorong transfer keterampilan melalui pelatihan bagi fasilitator dari komunitas agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Program ini diprioritaskan bagi generasi muda, perempuan adat, tokoh adat, dan ahli lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan komunitas sekaligus mendukung implementasi pengakuan wilayah adat dan penetapan hutan adat. Hingga saat ini, SPMAD telah menjangkau sekitar 3.653 penerima manfaat, yang terdiri dari 1.918 perempuan dan 1.735 laki-laki dari berbagai komunitas adat di Kalimantan Barat.



TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan *Special Consultative Status* untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

 **Instagram:** [infid_id](#)

 **Twitter:** [infid_id](#)

 **Facebook:** [Infid](#)

 **Linked In:** [Infid](#)

 **YouTube:** [INFID TV](#)

 **Website:** www.infid.org

Foto: Dok. INFID





ANGGOTA INFID

- Akatiga Foundation (Center for Social Analysis)
- Bina Desa Sekretariat
- Cahaya Perempuan Bengkulu (Women Crisis Center)
- CAKRAWALA TIMUR
- Center for Development and Culture (CDC-YBKS)
- Diakonia PGI
- DPP Wanita Katolik Republik Indonesia
- Flower Aceh
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
- Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (FOKER LSM)
- Forum LSM Aceh
- Forum LSM DI Yogyakarta
- Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
- Gita Pertiwi
- IDFoS Indonesia
- Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
- IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitoring)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKa)
- Institute KAPAL Perempuan
- Institute of Dayakology
- IRE Yogyakarta
- Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK)
- Jaringan Perempuan Untuk Keadilan (JARI ACEH)
- Kalyanamitra
- Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
- Koalisi NGO HAM Aceh
- Koalisi Perempuan Indonesia Setnas (KPI)
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
- Komite Anti Korupsi (KoAK)
- LAdA DAMAR Lampung
- Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
- Lembaga Bela Banua Talino LBBT
- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Migrant CARE
- Nexus3 Foundation
- Pelayanan Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (YAKOMA PGI)



ANGGOTA INFID

- Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
- Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
- Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
- Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
- Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK)
- Pesticide Action Network (PAN Indonesia)
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD)
- Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN)
- SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Aceh
- SDGs Center Universitas Bengkulu
- Society Empowerment And Development Institute (SCEDEI)
- Solidaritas Perempuan
- Swara Nusa Institute
- The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia)
- Urban Alternative Development Strategy (UADS)
- Urban Poor Consortium (UPC)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eknas)
- WCC Nurani Perempuan, Yayasan Zilla Nisaa
- Yayasan Alfa Omega
- Yayasan Annisa Swasti (YASANTI)
- Yayasan Bina Sumber Daya Mitra (BISMI)
- Yayasan Bina Swadaya
- Yayasan Bina Swagiri
- Yayasan Cindelarar Paritrana (Cindelarar Institute for Rural Empowerment and Global Studies)
- Yayasan Jurnal Perempuan
- Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM)
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel (YPMP SS)
- Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPMD - Irja)
- Yayasan SAHARA Aceh
- Yayasan Salafiyah Kholidiyah Plumpang
- Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
- Yayasan Suara Nurani Minaesa
- Yayasan Tanah Merdeka (YTM)